

URGENSI MODAL SOSIAL DALAM LIBERALISASI PEREKONOMIAN BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA

Rinda Asytuti

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan
email: af_riezka06@yahoo.com

Abstract: Trade liberalization influences small industries in Indonesia. This happens because of the high overheadcost, minimum technology, limited financial capital, and competitive and efficient marketing network. In order to overcome this problem, there must be tangible steps to reinforce the financial capital and other sectors for the small industries in Indonesia. One of the steps is reinforcing the social capital as the network and marketing reinforcement. Some researches stated that social capital is the efficient and effective means in reinforcing the existence of UMKM in Indonesia to face global trading.

Kata Kunci: modal sosial; liberalisasi perdagangan; usaha kecil menengah

A. Pendahuluan

Liberalisasi keuangan tidak dapat dihindari seiring dengan adanya liberalisasi perdagangan yang menuntut meminimalisir hambatan perdagangan dan keterbukaan pasar. Melalui liberalisasi perdagangan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan perdagangan dan efisiensi ekonomi

Pada dasarnya Indonesia secara internal telah mereformasi kebijakan di bidang perdagangan dekade 1980-an, ketika terjadinya penurunan harga minyak mentah sebagai ekspor andalan di pasar dunia yang banyak menyumbang devisa bagi Negara. Namun liberalisasi perdagangan semakin gencar dilakukan setelah adanya ratifikasi perjanjian antarnegara, kawasan dan global, seperti perjanjian pembentukan AFTA, APEC, dan akhirnya WTO (*World Trade Organization*).

Sistem perdagangan terbuka yang diusung oleh sistem ekonomi liberalisme dan neo-liberal, menuntut meminimalisir bahkan penghapusan campur tangan pemerintah dalam pasar. Hal itu dilakukan dengan cara mengurangi proteksi dan subsidi pada perdagangan dalam negeri sehingga diharapkan terjadinya kesempurnaan pasar antara pelaku usaha asing dan pelaku usaha dalam negeri. (Ulrich Duchrow, 1999: 291)

Dewasa ini, pembukaan keran impor seluas-luasnya bagi produk impor, akhirnya menjadi bumerang bagi produktivitas dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk luar yang relatif lebih murah. Dampaknya, liberalisasi perdagangan nyatanya tidak memberikan stimulus positif bagi peningkatan kualitas produksi dalam negeri seperti yang diharapkan, namun sebaliknya membawa dampak

buruk yang mengancam kelangsungan usaha domestik. Sebagai contoh peningkatan arus produk pangan dari luar negeri, mulai mengancam kesejahteraan para petani yang sudah cukup sulit. Penguasaan teknologi pertanian yang masih sederhana, tingginya ongkos produksi karena tingginya harga pupuk dan benih telah membuat produksi pangan Indonesia semakin tidak kompetitif. Akibat ketahanan pangan mulai mengancam dengan semakin tingginya ketergantungan negara terhadap pasokan pasar global.

Studi dampak liberalisasi keuangan dan perdagangan menemukan bahwa liberalisasi keuangan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan liberalisasi perdagangan akan mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri jika produksi dalam negeri mampu meningkatkan efisiensi produksinya. Namun, apabila terjadi ketimpangan arus impor dan arus ekspor produksi, liberalisasi perdagangan hanya akan mematikan produksi dan meningkatkan pengangguran yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Dampak negatif dari liberalisasi perdagangan dan keuangan bagi Indonesia akan dirasakan semakin berat ketika tidak diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu karena peningkatan sumber daya manusia saat ini tidak mampu menjelaskan pengaruh investasi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Institusi pendidikan hanya mampu meningkatkan kuantitas sumber daya manusia, tanpa diiringi peningkatan kualitas seperti kemandirian, *entrepreneurship* yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan penyerapannya dalam pasar kerja. Dampaknya peningkatan jumlah pengangguran semakin tinggi dan mendorong penurunan ekonomi.

Salah satu sektor usaha terdampak akibat liberalisasi perdagangan adalah sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) UKM tahun 2007 terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,3 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 7,8 persen. Jumlah populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.

Pada tahun 2007, nilai PDB UKM mencapai Rp 2.121,3 triliun meningkat sebesar Rp 335,1 triliun dari tahun 2006. Dari jumlah ini, UKM memberikan kontribusi sebesar 53,6 persen dari total PDB Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp 1.786,2 triliun atau 53,5 persen. Pada tahun 2007, kontribusi Usaha Kecil (UK) sebesar Rp 1.496,3 triliun (37,8 persen), Usaha Menengah (UM) sebesar Rp 625,1 triliun (15,8 persen), dan Usaha Besar (UB) sebesar Rp 1.836,1 triliun (46,4 persen). Pemberdayaan UMKM akan mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin (BPS, 2008).

Dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen di tahun 2007, sumbangan Usaha Kecil (UK) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,4 persen dan hanya 1,2 persen saja yang berasal dari Usaha Menengah (UM), sedangkan Usaha Besar (UB) menyumbangkan 2,7 persen. Ini menunjukkan walaupun akselerasi pertumbuhan kelompok UK dan UB pada umumnya tidak secepat UM, namun

dengan peranannya yang cukup besar dalam penciptaan nilai tambah nasional sumbangan kedua kelompok usaha ini terhadap peranannya (BPS, 2008).

Secara umum, menurut skala usaha, pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 4.864.568,1 (59,08 persen) dan Usaha Besar (UB) tumbuh 4,2 persen. Pertumbuhan tenaga kerja sebesar 107.657,509 atau (97,16%) dan total ekspor nonmigas 1.108.764,5 (85,94%) (Berdasarkan data tahun 2012, depkop.go.id).

Dari data tersebut sangat jelas bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor usaha kecil, mikro, dan menengah. Akan tetapi, gambaran ini akan terancam apabila pemerintah terlalu terburu-buru membuka keran arus perdagangan global yang pada akhirnya tidak menguntungkan pasar industri dalam negeri. Terlebih banyaknya hambatan dan karakteristik khusus dari unit usaha mikro dan kecil yakni keterbatasan permodalan, pemasaran, teknologi, dan lain-lain.

Untuk itu, guna penguatan unit usaha kecil dan menengah bukan hanya dibutuhkan kekuatan kapital sebagai bantalan usaha, tetapi juga dibutuhkan modal lain yang efektif yakni modal sosial. Secara khusus *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) tahun 2001 menggambarkan modal sosial dengan menyatakan bahwa “*Social capital is networks together with shared norms, values and understandings that facilitate cooperation within or among groups*”. Dalam definisi ini, modal sosial adalah sebuah jejaring organisasional yang dibangun berdasarkan norma-norma bersama dengan sistem nilai dan pemahaman-pemahaman bersama atas apa yang didasari yang dapat memperkuat kerja sama dan kohesi organisasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, kata kunci dari konsepsi modal sosial ini adalah pengembangan jejaring kerja dalam dan di luar organisasi (*network*), pengembangan jejaring sosial (*social network*), pengembangan rasa dipercaya (*trust*), penguatan norma-norma kerja dan hubungan antarorang dan antarorganisasi (*norms*), pengembangan kohesi sosial (*social cohesion*), pengembangan norma resiprositas (*norms of reciprocity*), serta pengembangan dan pemeliharaan kerja sama (*cooperation*) yang dalam tataran praktisnya dapat dikembangkan dan diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat menghasilkan dan meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya kinerja pemasaran.

Selanjutnya tulisan ini ingin membahas secara deskriptif pengaruh liberalisasi perdagangan dan keuangan terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia melalui modal sosial.

B. Pembahasan

1. Liberalisme dan Neo-liberalisme sebagai Arah Pembangunan Ekonomi

Liberal berarti kebebasan, atau *giving freely*. Ekonomi liberal berarti ekonomi yang menekankan pada kebebasan yang besar pada entitas perekonomian untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk di dalamnya penguasaan faktor-faktor produksi. Liberalisme memberikan pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi, mekanisme pasar dan menjadikan laba sebagai satu-satunya motif ekonomi.

Membicarakan ekonomi liberal tidak dapat dilepaskan dari paham Adam Smith dalam *The Wealth of Nation* tentang gagasan kebebasan individu untuk berusaha berdasarkan kepentingan dan motif pribadinya untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Smith, kebebasan yang diberikan kepada individu-individu ini (*laissez faire*)

akan berujung pada keseimbangan yang diatur oleh mekanisme *invisible hand* yakni mekanisme *supply and demand*. Beberapa literatur memaknai tangan gaib sebagai moral manusia. Hal ini didasarkan pada konteks sosiologis Smith sebagai mahaguru dalam filsafat moral.

Pada dasarnya ekonomi liberalisme yang diakomodasi oleh neoliberalisme menggambarkan kerangka pasar yang didudukkan dalam beberapa nilai, yakni *free market* dan pembatasan negara. *Free market* terjadi saat *positioning* swasta dibebaskan dari keterikatannya terhadap negara dan tanggung jawab atas permasalahan sosial yang terjadi karena aktivitas perusahaan mereka. Pembatasan negara terjadi di mana intervensi negara hanya akan mengarahkan pada konsentrasi kekuasaan negara dan akan merusak mekanisme ekonomi pasar (Kung, 2002: 318-320).

Ekonomi dalam teori liberal menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*high economic growth*) dan liberalisasi perdagangan. Kesimbangan pasar atau penciptaan pasar sempurna sebagai pijakan dari liberalisasi perdagangan berdiri atas beberapa asumsi yakni pertama bahwa semua pengusaha adalah pengusaha yang memiliki kondisi yang sama. Kedua, masing-masing pengusaha akan berusaha secara aktif untuk memenangi persaingan dan bertindak secara efisien untuk meningkatkan laba. Ketiga, Persaingan mengikuti hukum rimba yakni terkuat akan menang dan yang lemah harus ditinggalkan dan tidak perlu diberikan bantuan.

Ekonomi liberal dan neoliberal banyak digadang-gadang sebagai paradigma progresif positif bagi pembangunan ekonomi negara berkembang. Negara maju termasuk di dalamnya IMF dan Bank Dunia, menekankan jurus jitu ekonomi neoliberal yang berpangku pada pertumbuhan kepada negara berkembang dalam setiap nota kerja sama yang dilakukannya. Terdapat 10 kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh negara berlembang yang dikenal dengan *Consensus Washington*, yakni disiplin fiskal dengan menargetkan surplus anggaran, sektor finansial diserahkan pada mekanisme pasar, perluasan objek pajak, peningkatan belanja pemerintah untuk memperbaiki distribusi pendapatan, liberalisasi perdagangan, penghapusan proteksi dan subsidi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melindungi hak cipta, dan menghilangkan hambatan investasi bagi investor asing.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari negara yang sedang berkembang juga menggunakan paradigma ekonomi Neoliberal. Fokus pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan, semakin memperlebar jurang pendapatan kaya dan miskin. Kenaikan angka *Gross Domestic Product* (GDP) tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kemakmuran rakyat keseluruhan. Hal ini dipahami karena kekuatan perekonomian banyak dipegang oleh segelintir pengusaha yang miskin nasionalisme. Kemiskinan semakin tinggi dan sulit diurai, karena membentuk lingkaran setan kemiskinan (*the vicious cycles of poverty*).

Menurut Ragnar Nurske (1953) yang dimaksud dengan lingkaran setan kemiskinan adalah rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin. Faktor pendukung kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, tetapi juga kesulitan akibat dari pembangunan yang akan datang. Ditambahkan Kemiskinan yang terjadi dalam negara berkembang karena ketimpangan penawaran modal dan permintaan modal.

Angka kemiskinan Indonesia dalam Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini berkisar 28,07 % (data 2013) dari total penduduk Indonesia. Namun pada faktanya penduduk miskin Indonesia melebihi angka tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh kategori miskin yang dipakai. Penduduk miskin diukur dari rata-rata pendapatan per kapita per hari. Pada *verse* pertama adalah ukuran miskin bila penduduk hidup di bawah Rp 9500 atau U\$\$ 1 per kapita per hari dan di Indonesia terdapat 50 juta penduduk (22%). Namun apabila ukuran penduduk miskin U\$\$ 2 per kapita per hari maka terdapat 118 juta penduduk (52%) dikategorikan miskin. BPS memberikan kategori tersendiri tentang kemiskinan melalui dua komponen yakni GKM (Garis Kemiskinan Makanan) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GMKN). Garis kemiskinan makanan diukur dari nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yakni sebesar Rp 253,273,6/bulan/kapita. Garis kemiskinan nonmakanan adalah kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Selain kemiskinan, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada pertumbuhan di mana bisnis dimaknai “*self interest*” dan mendudukkan manusia sebagai “*homoeconomicus*” memberikan efek eksternal merugikan bagi alam dan lingkungan sosial, seperti pencemaran, polusi dan kerusakan bumi, efek rumah kaca dan pemanasan global (*global warming*). Kritik tajam atas mekanisme pasar bebas neoliberal dilontarkan oleh kaum strukturalis seperti Lester Thurow yang berpendapat bahwa kejahatan yang ditimbulkan oleh pasar bebas disebutnya sebagai “*dangerous currents*” atau arus deras mekanisme pasar bebas yang berbahaya. Pasar bebas akan membentuk ekonomi tidak berkeadilan karena arah produksi hanya mengakomodasi selera dan tuntutan ekonomis kelompok pemilik kapital tinggi dan mengalienasi kepentingan pemilik kapital rendah (miskin)(Swasono: 2005,23)

Kapitalisme industri mendudukkan pekerja bukan sebagai *stakeholder* yang mempunyai hak dalam perusahaan, melainkan sebagai bagian dari faktor produksi yang harus dimanfaatkan memaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Selain itu industrialisasi mendorong perusahaan untuk menciptakan teknologi yang lebih besar bahkan membahayakan.

Haque bahkan menyatakan bahwa kapitalisme gagal memberikan kesejahteraan kepada dunia. Kapitalisme bahkan mempurburuk kondisi sosial ekonomi di dunia ketiga dengan meningkatnya angka kemiskinan). Beberapa kritik terhadap kapitalisme dan neoliberalisme terus didengungkan oleh penganut aliran kesejahteraan seperti Spicker, Thurow, Horkheimer, Marcuse Roszak, dan Adorno. Menurut mereka, kapitalisme hanya akan menskenariokan pembangunan koruptif yang dikuasai oleh elit teknokrat dan elit konglomerat yang akan mematikan kesejatan manusia, keselarasan, keseimbangan dan mengasingkan manusia dari semesta dan sesamanya.

2. Modal Sosial

Saat ini disadari bahwa modal sosial memiliki peranan penting dalam pembangunan sebuah negara. Urgensi modal sosial sebenarnya telah disinyalir oleh Adam Smith pada abad ke 18 dengan penggunaan kata “*social contract*” sebagai salah satu bagian penting untuk kemajuan pembangunan. Modal sosial yang kuat dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan berbagai aspek pembangunan sebuah negara

termasuk ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik (Ostrom, 1993; Coleman, 1988; Mackie, 1998).

Berbeda dengan modal ekonomi, modal sosial dipahami sebagai modal yang lebih menekankan pada kekuatan kelompok, jaringan, nilai norma, kepercayaan dan pola-pola hubungan antara entitas-entitas dalam sebuah jaringan atau kelompok masyarakat (Fukuyama, 1995; Adams & Someswar, 1996; Ibrahim; 2006, Lubis, 2002). Sebagaimana pengertian Robert D Putnam dalam mendefinisikan Modal Sosial “*a set of informal value norms shared among members of a group that permits cooperation among them. If members of the group come to expect that others will behave reliably and honestly, then they will come to trust one another. Trust is like a lubricant that makes the running of any group or organization more efficient*”.

Pemikiran tentang modal sosial modern lahir digawangi oleh kajian-kajian Robert D Putnam, Francis Fukuyama, Paul Bullen Cohen, Prusak, dan lain-lain. Namun mengutip tulisan Anas S Mahfud dalam makalahnya yang berjudul “*Social Capital*”. Istilah *social capital* sendiri pertama kali digunakan oleh Jane Jacobs pada tahun 1916, ketika ia menggambarkan pusat sekolah di pedesaan dalam buku klasiknya *The Death and Life of Great American Cities*, yang intinya ingin menjelaskan derajat jaringan sosial dalam ketetanggaaan masyarakat pedesaan dalam bentuk *social capital* dalam mendorong keamanan publik. Kemudian istilah itu digunakan oleh ekonom Glenn Loury dan sosiolog Ivan Light, pada tahun 1970-an dalam menganalisis problem *inner-city* dalam perkembangan ekonomi. Pada dekade 1980-an, konsep *social capital* dipopulerkan oleh sosiolog James Coleman dan ilmuwan politik Robert Putnam (Fukuyama, 1999), khususnya dalam penelitiannya di Italia dan masalah kemunduran Amerika pada dekade 1960-an.

Di sisi lain, Jousairi Hasbullah dalam bukunya *Social Capital* (menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia) menyebutkan bahwasannya pembahasan modal sosial sudah digulirkan pada abad ke 18 melalui “*Social Contract*” oleh Adam Smith dan dikembangkan seterusnya oleh Karl Marx dan Engles dengan konsep keterikatan yang memiliki solidaritas (*bounded Solidarity*), di mana dijelaskan adanya kemungkinan muncul hubungan kerja sama yang kuat ketika suatu kelompok berada dalam sebuah tekanan (Woolcook, 1998; Jausari Hasbullah, 2006).

Teori Bourdieu (1985) memahami modal sosial sebagai “*The aggregate of the actual or potential resources which are linked to the possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition*”, sehingga modal sosial dapat dipahami sebagai berbagai sumber daya actual dan potensial yang mampu menghasilkan jejaring hubungan kerja yang saling menghargai, saling memaknai (Wackman, dalam Field, 2005). Menurut Coleman (1990) modal sosial (*social capital*), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. Modal sosial adalah bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitutionalisasi dalam bentuk kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif.

Dari definisi yang telah diberikan modal sosial memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

a. Partisipasi dalam suatu jaringan

Keberhasilan modal sosial tergantung dari kapasitas anggota kelompok untuk melibatkan diri dalam suatu jejaring sosial. Dalam hal ini sinergi antaranggota kelompok mempengaruhi kuat tidaknya modal sosial di dalam kelompok. Semakin sering berpartisipasi di dalam aktivitas, semakin besar peluang untuk mendapatkan modal sosial yang tumbuh dalam kolektivitas. Partisipasi masyarakat dalam hubungan sosial dilakukan atas beberapa prinsip, yakni prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*).

Partisipasi seseorang dalam jaringan akan menimbulkan keterikatan dengan anggota jaringan. Semakin tinggi intensitas partisipasi anggota, semakin kuat jaringan sosial tersebut. Kekuatan jaringan inilah bagian dari modal sosial yang akan menjadikan kekuatan. Konsep keterlekatan (*embeddedness*) juga ditekankan oleh Grannoveter di dalam Ritzer (2001: 6) bahwa, “*Economic action take place within the networks of social relation that make up the social structure,*” yang ditambahkan oleh Ritzer (2001: 6; Di Maggio, 1990) bahwa “*Economic action is embedded not only in social structure but also in culture*”.

b. *Reciprocity*

Terdapatnya nuansa altruism yaitu semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain, atau dalam hal ini adalah refleksi masyarakat dalam kepedulian sosial. Dalam hal ini, hubungan timbal balik harus memiliki hubungan yang bersifat “simbiosis mutualisme”.

Tingkat kekuatan *reciprocity* yang dimiliki oleh suatu komunitas tidak signifikan memberikan efek positif komunitas lainnya. Hal ini tergantung pada sifat dan orientasi nilai yang berkembang didalam masyarakat tersebut. Menurut Jauhari Hasbullah dampak resiprositas akan berbeda bagi masyarakat tergantung pada tipologi masyarakatnya. Bagi masyarakat terbuka bila suatu kelompok memiliki resiprositas kuat dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat lainnya, namun tidak pada masyarakat tertutup. Tingkat resiprositas kuat yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertutup tidak memberikan pengaruh signifikan bagi masyarakat lainnya (Hasbullah: 2006:11).

c. *Trust*

Putnam dalam Hasbullah (2006: 11) berpendapat bahwa kepercayaan (*trust*) mengandung arti suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

d. Norma Sosial

Norma merupakan aturan-aturan sosial yang tidak tertulis dan terinstitusionalisasi di mana faktor-faktor tersebut bersifat kolektif yang dapat mencegah individu dari penyimpangan-penyimpangan sosial. Apabila nasabah dari lembaga keuangan informal mencuri dana (*ngemplang*), maka terdapat norma yang berlaku pada masyarakat, di mana akhirnya mempengaruhi stabilitas dan interaksi sosial dari nasabah itu sendiri di mata masyarakat tertentu.

e. Nilai-nilai

Konfigurasi nilai-nilai yang terkandung pada masyarakat tertentu akan mempengaruhi kuat-lemahnya modal sosial. Nilai-nilai yang baik di masyarakat tertentu akan meningkatkan dan memperkuat modal sosial. Sebaliknya, masyarakat juga akan menilai individu perilakunya yang kurang baik, apabila terdapat stigma buruk, kecil kemungkinannya individu tersebut memperoleh modal sosial dari orang lain.

f. Tindakan yang proaktif

Tindakan proaktif yang dimaksud adalah individu tidak hanya harus berpartisipasi dalam suatu kegiatan masyarakat, tetapi juga harus selalu senantiasa ikut melibatkan diri secara utuh di dalamnya. Dengan adanya keterlibatan penuh, maka seseorang akan mendapatkan modal sosial dalam hubungan dan interaksi sosial pada mereka.

3. Modal Sosial dan Pembangunan

Kedudukan modal sosial dalam perdagangan semakin penting seiring dengan terjadinya perdagangan bebas dan migrasi bebas (Schiff, 2000). Kegiatan pembangunan akan lebih mudah dicapai dan biayanya akan lebih kecil jika terdapat modal sosial yang besar (Narayan dan Prittchett, 1997; Grootaert dan van Bastelaer, 2001). Perlu disadari bahwa dalam modal sosial dibutuhkan adanya “nilai saling berbagi” (*shared values*) serta pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (*personal relationships*), kepercayaan (*trust*), dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama sehingga masyarakat menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu belaka (Worldbank, 2000).

Unsur-unsur dalam modal sosial sangat diperlukan bagi pembangunan berkelanjutan di mana modal/*capital* berupa *natural capital*, *physical* atau *produced capital*, dan *human capital* akan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan jika didukung *social capital* yang baik dalam sebuah negara (Grootaert, 1997). Fungsi modal sosial pada tingkat mikro berguna untuk memfungsikan pasar. Pada level makro modal sosial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Subejo, 2004; Serageldin dan Grootaert, 1997). Penelitian Fafchamps dan Minten (1999) menemukan bahwa “... *traders who do not develop the appropriate social capital, do not grow*”. Modal sosial terbukti mempengaruhi pertukaran ekonomi (*economic exchange*) dalam dua bentuk, yaitu kepercayaan dan emosi dalam kelompok atau jaringan, dan keuntungan yang diperoleh secara langsung secara individual atau sebuah perusahaan dengan mengenal pihak lain secara mendalam melalui jaringan ataupun pelanggan (*interconnected agents*). Dalam penelitiannya, Fafchamps (2007) menegaskan bahwa modal sosial dapat mengurangi biaya dalam memperoleh barang, meningkatkan difusi inovasi, dan mereduksi resiko dan memperlihatkan bahwa pedagang memanfaatkan jaringan dan modal sosial untuk mengatasi tiga masalah penting dalam pasar yang tak sempurna (*imperfect markets*) yang umum dijumpai di negara berkembang. Modal sosial memainkan perannya secara nyata dalam kondisi kelembagaan pasar yang lemah apalagi gagal. Modal sosial dapat menjadi sumber kredit ketika kredit formal tidak bisa diakses oleh pengusaha terlebih bagi pengusaha kecil yang memiliki karakteristik lemah dalam bidang administrasi keuangan.

4. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil menengah seringkali dikonotasikan sebagai usaha informal yang memiliki aset kecil, tidak memiliki pembukuan yang teratur, tempat usaha tidak mapan dan tidak memiliki legalitas usaha (Amalia, 2009). Dalam Keputusan Kementerian Keuangan, Usaha Kecil Menengah didefinisikan sebagai usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet per tahun maksimal 600 juta. Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) No.9 tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai segala kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan yang sesuai dengan undang-undang. Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang adalah pertama memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Kedua memiliki hasil penjualan tahunan maksimal satu miliar. Ketiga berdiri sendiri bukan anak perusahaan, keempat milik warga negara Indonesia dan kelima berbentuk usaha perorangan.

Bila dibandingkan dengan pengusaha besar dan menengah terdapat beberapa kelemahan yang menjadi ciri pengusaha kecil, yakni kurangnya permodalan, lemahnya tingkat produksi, keterbatasan pengetahuan manajemen, keterbatasan jaringan pemasaran, keterbatasan sumberdaya manusia dan jaringan produksi, serta pemasaran. Saat ini perhatian pemerintah terhadap usaha kecil menengah di Indonesia cukup berkembang. Perhatian ini diwujudkan dengan program-program pendampingan dan pemudahan Kredit Usaha Kecil Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bekerja sama dengan lembaga keuangan.

Untuk mendukung pengusaha sangat mikro yang tidak memiliki *capital* cukup, pemerintah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 5 juta tanpa agunan. Namun bantuan modal ini dirasakan tidak efektif dalam meningkatkan ketahanan usaha kecil di Indonesia.

Pengembangan usaha kecil tidak hanya dititikberatkan pada sisi permodalan kapital saja melainkan terdapat ranah-ranah lain yang harus diperhatikan. Tawaran Kacung Maridjan tentang pemberdayaan usaha kecil menengah dengan sistem kluster (*cluster approach*) sangat menarik. Dalam artikelnya yang terbit di Jurnal Insan Vol. 7 No. 3, Desember 2005, Maridjan menawarkan bahwa pendekatan kluster adalah salah satu langkah efektif pada peningkatan Industri Kecil Menengah (IKM). Pengklusteran industri tidak hanya ditempatkan pada sisi *Geographical Cluster*, dan kesamaan jenis industri, tetapi lebih efektif bila ditempatkan pada ketersediaan koneksitas dalam sebuah industri tertentu.

Pendekatan kluster yang aktif akan memberikan dampak positif pada terjalannya '*collective efficiency*' (efisiensi kolektif). *Collective efficiency* adalah keunggulan kompetitif yang disebabkan oleh *external economies* dan *joint action* (aksi bersama). Untuk menumbuhkan aksi bersama di dalam kluster dibutuhkan modal sosial yang kuat yakni rasa percaya (*trust*) antara satu dengan lainnya, kerja sama, koneksitas (jaringan) dan nilai yang diyakini oleh semua anggota kluster sehingga didapatkan sebuah tujuan untuk mendapatkan kejayaan /sukses secara bersama-sama bukan sendiri sendiri.

Koneksitas dan jaringan adalah modal terbesar selain modal kapital. Koneksitas dan jaringan adalah bagian yang terdapat dalam modal sosial. Modal sosial sebenarnya bukanlah modal yang sulit didapatkan. Secara potensial nilai-nilai dan budaya

masyarakat Indonesia telah mengarahkan hal tersebut salah satunya budaya gotong royong, sosialisasi/berkumpul (arisan), koperasi, dan pembentukan ikatan kekeluargaan. Namun sering kali hal-hal ini tidak terejawantahkan dengan baik, sehingga tidak disadari sebagai *potensial factor* pendorong kesuksesan. Hemat penulis, selain pendekatan kluster ada beberapa langkah penguatan IKM/UKM antara lain penciptaan kondisi ekonomi yang kondusif, keberpihakan negara dengan memberikan beberapa insentif seperti pajak, dan subsidi, penguatan jaringan pemasaran ke luar negeri melalui program kemitraan, perlindungan usaha, penumbuhan asosiasi usaha, dan pelatihan.

Penelitian Rinda Asyuti dkk yang meneliti tentang modal sosial di kalangan pengusaha Warung Tegal di Jakarta menemukan bahwa modal sosial secara signifikan mempengaruhi ketahanan usaha pengusaha Warung Tegal. Perkumpulan atau asosiasi dan nilai-nilai seperti tingkat kohesitas, norma, *trust*, dan *networking* di kalangan pengusaha Warung Tegal terbukti meningkatkan ketahanan usaha di kalangan mereka. Berikutnya penelitian Sinta (2010) dan penelitian Fafchamps dan Minten (1999) juga membuktikan bahwa *networking* sebagai bagian dari modal sosial dapat mengurangi biaya dalam memperoleh barang, meningkatkan difusi inovasi, dan mereduksi resiko (Sayuti, 2007: 8).

C. Penutup

Seiring dengan menguatnya jaringan perdagangan bebas di Indonesia, maka peningkatan ketahanan usaha kecil menengah sebagai salah satu penopang ekonomi riil menjadi sangat penting. Dari penelitian tentang modal sosial yang telah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa peningkatan ketahanan usaha kecil menengah dapat dilakukan tidak hanya menggunakan pendekatan peningkatan *capital* (arus modal), melainkan dengan cara meningkatkan modal sosial (*social capital*) di kalangan usaha kecil menengah, yakni peningkatan tingkat kohesitas, norma, *trust*, dan *networking*.

Daftar Pustaka

- Amalia, Euis. 2009. *Kedilan Distributif Salam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Anas, S Mahfudz. 2011. "Sosial Capital". Makalah tidak dipublikasikan. http://www.appropriateeconomics.org/materials/social_capital_and_the_firm.pdf. Diakses tanggal 20 September 2011.
- Duchrow, Ulrich. 1999. *Mengubah Kapitalisme Dunia: Tinjauan Sejarah Al-Kitabah bagi Aksi Politis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fafchamps, Marcel dan Bart Minten. 1999. "Social Capital and the Firm". Makalah diambil dari Evidence from Agricultural Trade. http://www.appropriateeconomics.org/materials/social_capital_and_the_firm.pdf.
- _____. 2007. "Trade and Social Capital". Makalah diambil dari Global Poverty Research Group. <http://www.gprg.org/themes/t4-soccap-pub-socsafe/sc-uses/trade-sc.htm>. Diakses tanggal 20 September 2011.
- Grootaert, C dan T van Bastelaer. 2001. "Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social

- Capital Initiative”. Social Capital Initiative Working Paper No. 24. Washington, D.C: The World Bank.
- Grootaert, C. 1997. “Social Capital: The Missing Link?”. Article in *Expanding the Measure of Wealth: Indicators of Environmentally Sustainable Development*. Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series No. 7. Washington, DC: The World Bank.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2009. “Sebuah Diskursus Mengenai Modal Sosial”. Makalah.
- Kung, Hans. 2002. *A Global Ethics for Global Politics and Economics*. Yogyakarta: Qalam.
- Marijan, Kacung. 2005. “Mengembangkan Industri Kecil Menengah melalui Pendekatan Kluster. Jurnal Insan Volume 7 No. 3, Desember 2005. Diakses tanggal 20 September 2011.
- Mudrajad, Kuncoro. 2000. “Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan”. Diakses tanggal 21 September 2011.
- Putnam, R. 1993. “The Prosperous Community-Social Capital and Public Life”. *American Prospect* (13): 35-42.
- Rismawati, Shinta Dewi, dkk. 2010. “Pedagang Pasar Tiban dan Modal Sosial”. Penelitian di P3M STAIN Pekalongan.
- Schiff, Maurice. 2000. “Love They Neighbor: Trade, Migration, and Social Capital World Bank”. Development Research Group (DECRG); Institute for the Study of Labor (IZA). May 8, 2000. Worldbank Working Paper. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=229615. (social science research network).
- Subejo. 2004. “Peranan *Social Capital* dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar untuk Studi *Social Capital* di Pedesaan Indonesia”. Artikel dalam Majalah Agro Ekonomi Vol.11 No.1 Juni 2004. Hlm. 79.
- Subri Mulyadi. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Swasono, Sri-Edi. 2005. *Ekspose Ekonomika, Mewaspadai Globalisme dan Arus Bebas*. Yogyakarta: Pustep-UGM.
- Syahyuti. 2007. “Urgensi Perlunya Perubahan Perspektif Kebijakan untuk Mengoptimalkan Peran Pedagang Hasil-Hasil Pertanian. Makalah.
- T.O., Ihromi (Editor). 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- World Bank. 1998. “The Initiative on Defining, monitoring and Measuring Social Capital: Text of Proposal Approved for Funding”. *Social Capital Initiative Working Paper No. 2*. The World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially Sustainable Development Network. June 1998
- World Bank. 2000. *World Development Report 1999/2000: Entering the 21st Century*. New York: OxfordUniversity Press.
- World Bank. 2006. “Social Capital in Economics, Trade and Migration”. <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/topic/econ1.htm>.